

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengetahuan audit, pengalaman audit dan independensi auditor terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Gambaran pengetahuan audit, pengalaman audit, independensi auditor, dan kemampuan pendeteksian kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada kategori cukup baik, yang menunjukkan bahwa auditor internal telah memiliki kompetensi dasar yang memadai dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
2. Variabel pengetahuan audit pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Variabel pengalaman audit dan independensi auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengalaman auditor serta semakin kuat sikap independensi yang dimiliki, maka semakin baik pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3. Pengetahuan audit, pengalaman audit dan independensi auditor secara simultan, memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengetahuan audit, pengalaman audit dan independensi auditor terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan (*fraud*) pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pendeteksian kecurangan (*fraud*) melalui penguatan sistem pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi audit yang lebih modern. Penggunaan teknik audit berbasis teknologi, seperti analisis data dan sistem pengendalian internal yang terintegrasi, dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi indikasi kecurangan secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap prosedur audit yang diterapkan agar selalu menyesuaikan dengan perkembangan modus kecurangan yang semakin kompleks di lingkungan pemerintahan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kebaruan (*novelty*) penelitian dengan mengeksplorasi faktor-faktor lain yang belum banyak dikaji dalam konteks Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), mengingat hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa 44% kemampuan pendeteksian kecurangan (*fraud*) masih dipengaruhi oleh variabel di luar model penelitian ini. Selain itu, perluasan objek penelitian pada instansi pemerintah daerah lain dengan karakteristik birokrasi dan wilayah yang berbeda diharapkan dapat memperkaya temuan empiris dan memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan literatur audit sektor publik.